

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017
(Studi di Kecamatan Tahuna Barat)**

*Ireine Marcelia Masambe¹
T. A. M. Ronny Gosal²
Alfon Kimbal³*

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perbincangan menarik hampir disemua kalangan, hal ini merupakan suatu hal yang lazim mengingat pemilihan kepala daerah menuntuk peran dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode kualitatif dimaksudkan untuk dapat menggali informasi secara obyektif terhadap permasalahan yang diteliti, dimana informan berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe, Panwas Kabupaten, Ketua PPK, Ketua Panwas Kecamatan, Anggota KPPS, Masyarakat yang menggunakan hak pilih, PPS, Ketua Partai politik, dan Anggota Partai Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tahuna Barat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 cukup tinggi, hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara, masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilukada. tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpartisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Salah satu syarat berjalannya demokrasi adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan berkala. Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, didalamnya disebutkan Pasal 1 ayat (1) bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi, dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Pemilihan umum adalah salah satu wujud dari budaya demokrasi, di mana pemilu yang merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Pemilihan umum juga merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden

atau wakil presiden maupun kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal salah satunya adalah dengan melaksanakan Pemilukada di daerah-daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Dengan itu rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik masyarakat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki pilihan dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada pilihan masyarakat sebagai pemilih, tidak hanya itu partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi,

partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem perpolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari perubahan politik, makna pemilukada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan yang besar agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pemilukada baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat mendasar dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik berdemokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu. Begitu pentingnya peran masyarakat dalam pemilu khususnya pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota secara langsung partisipasi masyarakat merupakan komponen utama dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pemilukada. Hal itu dipahami mengingat dalam pemilukada secara langsung tingkat partisipasi masyarakat yang datang ke bilik suara untuk memilih calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat menentukan apakah pemilukada dilangsungkan dalam satu putaran atau dua putaran.

Melalui pemilukada masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang kepala daerah, juga apakah organisasi politik

menopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu sebagai bagian dari pemilihan umum pemilukada harus dilaksanakan dengan demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Sebagaimana pesta demokrasi (pemilukada) di Kabupaten sangihe yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan secara langsung diikuti oleh dua pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan data yang di rilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, partisipasi masyarakat Sangihe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sangihe tahun 2011 adalah sebesar 76,21% dengan total pemilih sebanyak 81.274 orang dari 106.015 orang yang terdaftar dalam DPT. Itu berarti ada 24.741 orang atau sekitar 23,33% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 partisipasi adalah sebesar 79,84% dengan total pemilih sebanyak 85.000 orang dari 106.462 orang yang terdaftar dalam DPT. Itu berarti pada pemilihan tahun 2017 ada 21.486 orang atau sekitar 20,16% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2011 di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan sangihe sebesar 84,40% dengan total pemilih 3.636 orang dari 4.308 orang yang terdaftar dalam DPT. Dan yang tidak menggunakan hak pilihnya ada 672 orang atau sekitar 15,60%. Dan untuk tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat untuk wilayah Kecamatan

Tahuna Barat mencapai angka 89,00% dengan total pemilih 4.030 dari 4.528 orang yang terdaftar dalam DPT, dan jumlah yang tidak memberikan hak pilihnya 498 orang atau sekitar 10,00%. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah untuk memilih bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengalami peningkatan dengan jumlah pemilih tetap yang juga mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang cukup baik dalam upaya menciptakan masa depan demokrasi.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya Kecamatan tahuna Barat dalam pemilihan Kepala daerah merupakan suatu tahapan yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi. Selain sebagai pemenuhan target partisipasi juga dapat dimaknai sebagai keberhasilan institusi dan lembaga proses demokrasi dalam meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat kesadaran berdemokrasi yang tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai fenomena seperti halnya mobilisasi suara. Pilihan mereka dapat disebabkan oleh berbagai pertimbangan misalnya mereka memilih atas dasar paksaan, ikut-ikutan, atau memang berdasarkan pilihannya sendiri dan atau hanya menjadi objek politik praktis. Kenyataan tersebut mengakibatkan

tidak tercapainya tujuan dari pendidikan politik itu sendiri, padahal masyarakat sangat berperan penting dalam kegiatan politik. Fakta yang dapat di gali dari lapangan adalah bahwa masih adanya pemilih yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa dibekali dengan kesadaran dan pemahaman yang cukup. Maka tidak hayal banyak oknum-oknum tertentu memanfaatkan kurangnya pengetahuan akan politik dan pandangan-pandangan negatif terhadap politik dengan cara tidak sehat yang kemudian menjadi sebab partisipasi politik pun berjalan dengan tidak sehat. Penggunaan hak politik masyarakat tidak diiringi dengan pendidikan politik yang memadai. Partisipasi politik masyarakat bukan hanya pada soal bagaimana mencoblos tanda atau gambar seseorang, melainkan kesadaran dan pendewasaan politik masyarakat yang perlu ditumbuhkan.

Partisipasi politik masyarakat bukan hanya sebatas bagaimana memberikan suara dalam proses pemilihan, tapi juga sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi dan ambil bagian dalam proses partisipasi politik lainnya seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dan lain sebagainya. Bentuk partisipasi setiap orang pastinya berbeda-beda. Fenomena yang terjadi berhubungan dengan partisipasi politik ini kemudian menimbulkan pertanyaan seperti apakah masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan partisipasi politik untuk memilih bupati dan wakil bupati, apakah hanya sebatas memberikan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati, menghadiri

rapat umum, atau bahkan menjadi anggota dari partai politik. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe? Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partispate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Soeharno: 2004; 102). Menurut Miriam Budiarjo (Anwar Arifin 2015:78) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public

policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Konsep Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) tahun 2008, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu atau diartikan sebagai golongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu (Sinaga, 2013:10). Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang

memiliki keempat ciri yaitu: 1)Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3)Kontinuitas waktu, 4)Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118). Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Tjokromidjojo (Sedarmayanti, 2004) menjelaskan bahwa masyarakat dalam konteks kenegaraan atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara social, politik, dan ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik

(Bogdan dan Taylor, 1992 dalam Wiratna sujarweni, 2014:6)

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tahuna Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 dengan menggunakan teori Miriam Budiardjo tentang partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy), dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pemberian suara dalam pemilu
2. Menghadiri rapat umum
3. Menjadi anggota partai

Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Sangihe
2. Panwas Kabupaten
3. Ketua PPK
4. Ketua Panwas Kecamatan
5. Anggota KPPS
6. Masyarakat yang menggunakan hak pilih
7. PPS
8. Ketua Partai politik
9. Anggota Partai Politik

Hasil Penelitian

Partisipasi politik masyarakat merupakan penentu berhasil tidaknya pelaksanaan suatu pemilihan umum, seperti halnya pemilihan kepala daerah. partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilukada sebagian besar adalah pada proses pemberian suara,

dimana masyarakat terlibat secara langsung untuk memilih pemimpin daerah mereka.

Seperti halnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017. dimana masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan sangihe untuk memilih bupati dan wakil bupati. Mereka ikut memberikan suara pada pelaksanaan pemilukada tahun 2017. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Buan Abas (56 Tahun): “Ya, Saya ikut memilih bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun 2017 kemarin” (wawancara tanggal 3 April 2017).

Ibu Getrintje Lolaroh (59 Tahun) juga mengatakan: “Ya, saya ikut berpartisipasi memilih bupati dan wakil bupati sangihe tahun 2017” (wawancara tanggal 4 April 2017). hal yang sama seperti yang disampaikan Bapak Rodius (51 Tahun): “Ya, saya ikut memilih pada pilkada tahun 2017” (wawancara tanggal 5 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, untuk terlibat secara langsung dalam proses pemberian suara. Dimana masyarakat ikut memilih pada pelaksanaan pemilukada tahun 2017. Informan atas nama Ibu Miske Lungkang (42 Tahun) juga menyampaikan ikut berpartisipasi pada dengan cara memberikan suara pada pilkada kabupaten kepulauan sangihe tahun 2017: “Pada pilkada sangihe tahun 2017 saya ikut memilih juga” (wawancara tanggal 6 April

2017). Jeintri pangandaheng (23 Tahun) juga mengatakan keikutsertaannya dalam memberikan suara pada pilkada sangihe tahun 2017: “Ya, saya ikut memilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kemarin”(wawancara tanggal 7 April 2017).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa masyarakat kabupaten kepulauan sangihe khususnya masyarakat Kecamatan Tahuna Barat ikut berpartisipasi dengan cara memberikan suara pada pelaksanaan pemilukada kabupaten kepulauan sangihe tahun 2017.

Dari informasi yang diperoleh peneliti dari Ketua Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Tahuna Barat bapak Samuel Mariadi (49 Tahun) mengatakan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan tahuna Barat cukup baik karena dalam presentasi kehadiran mencapai 89.00%: “menurut saya partisipasi politik masyarakat kecamatan tahuna barat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 cukup baik, dimana pada pilkada tahun 2017 masyarakat yang ikut memilih mencapai 89.00%” (wawancara tanggal 27 Maret 2017).

Ketua KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga mengatakan untuk indeks demokrasi Kabupaten Sangihe mengalami peningkatan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Elsyee Sinadia (48 Tahun) selaku Ketua KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe: “pada pilkada tahun 2017 ini memang bisa dilihat adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara.

Untuk pilkada tahun 2017 target partisipasi secara nasional 77,5% dan untuk kabupaten kepulauan sangihe menargetkan untuk partisipasi politik 80%, dalam pelaksanaan tugas untuk kabupaten sangihe angka partisipasi masyarakat dalam pemberian suara ada di bilangan 79,65% itu berarti untuk indeks demokrasi kita agak naik dibandingkan dengan pilkada 2011 dan juga pilkada waktu pemilihan gubernur yang hanya mencapai 62%” (Wawancara tanggal 5 April 2017).

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat umum pada pimilukada tahun 2017 bisa dikatakan sangat antusias. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPC partai golkar Bapak Nader Bawadja (57 Tahun) yang juga merupakan koordinator kampanye dari pasangan yang diusung partai golkar: “kalau bicara soal rapat umum berarti kita bicara soal partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kampanye. Dari yang saya lihat karena saya terlibat langsung dalam kampanye masyarakat sangat antusias dalam menghadiri kampanye, sebagian besar ikut agar dapat mengetahui visi dan misi dari pasangan calon, tapi ada juga yang hanyaikut-ikutan meramaikan saja” (wawancara tanggal 6 April 2017 di kantor DPC partai Golkar kabupaten Sangihe).

Hal serupa juga dikatakan oleh ketua secretariat DPC partai PDI-P bapak Yonly R. Ambat (40 Tahun): “antusias dan keinginan masyarakat dalam menghadiri rapat umum yaitu kampanye bisa dikatakan cukup tinggi, dilihat pada waktu pelaksanaan kampanye dan kehadiran masyarakat

dalam kampanye, yang tentunya ingin mengetahui visi dan misi dari pasangan calon yang mereka dukung” (Wawancara tanggal 6 April 2017 di Kantor DPC PDI-P Kabupaten Sangihe).

Dalam pelaksanaan pemilihan umum kegiatan rapat umum yang paling banyak dihadiri oleh masyarakat adalah kegiatan kampanye. Sebagian besar masyarakat ikut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kampanye. Kehadiran masyarakat merupakan wujud dukungan masyarakat kepada pasangan calon yang mereka dukung. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Buan Abast (56 Tahun): “iya, saya mengikuti kampanye untuk mendukung pasangan calon yang saya pilih bersama dengan teman-teman saya lainnya.” (wawancara tanggal 3 April 2017)

Partisipasi politik masyarakat untuk menjadi anggota partai tergantung situasi, hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPC partai Golkar kabupaten Sangihe bapak Nader Bawadja: “antusias masyarakat untuk menjadi anggota partai politik biasanya tergantung situasi dan kondisi partai itu sendiri, mengapa saya mengatakan demikian, ini bisa kita lihat ketika popularitas suatu partai itu naik maka ketertarikan masyarakat untuk bergabung dengan partai itu juga tinggi, tapi ketika popularitas partai itu turun maka itu juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk bergabung dengan partai itu. Bisa saja ketertarikan masyarakat terhadap suatu partai berubah tergantung popularitas partai itu” (wawancara tanggal 6 April 2017 di

kantor DPC partai Golkar kabupaten Sangihe).

Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekretariat DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Sangihe Bapak Yonly Ambat (40 Tahun): “ketertarikan masyarakat menjadi anggota suatu partai itu tergantung situasi yang ada di partai politik itu sendiri, biasanya masyarakat melihat dari popularitas partai itu sendiri. Untuk partai PDI-P keanggotaan meningkat untuk setiap tahunnya” (Wawancara tanggal 6 April 2017 di Kantor DPC PDI-P Kabupaten Sangihe).

Popularitas suatu partai tentunya juga menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk turut ambil bagian dalam suatu partai tertentu. Semakin tinggi popularitas suatu partai maka semakin tinggi juga keinginan masyarakat untuk bergabung dengan partai tersebut, begitu juga sebaliknya semakin rendah popularitas dari suatu partai maka keinginan masyarakat untuk bergabung dengan partai tersebut semakin berkurang. Popularitas suatu partai juga berpengaruh pada penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap partai yang ada. Untuk menjadi anggota partai memang tidak ada persyaratan yang berbelit-belit, keinginan masyarakat untuk bergabung dengan partai politik dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Partisipasi politik masyarakat untuk bergabung dengan suatu partai bisa berbeda-beda. Seperti halnya ada yang memilih menjadi anggota tetap dari suatu partai, ada juga yang menjadi simpatisan, relawan, dan juga tim

sukses dari pasangan calon yang di usung dari partai politik yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tahuna Barat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 cukup tinggi. hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara sebanyak 4.030 orang dari 4.528 orang yang terdaftar dalam DPT dengan pencapaian partisipasi sebesar 89.00%. Pasangan nomor urut 1 Drs. H. R. Makagansa, M.Si dan dr Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD memperoleh suarasebanyak 1.523 (37.90%) dan pasangan nomor urut 2 Jabes E. Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE memperoleh suara sebanyak 2.495 (62.10%).

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilu. Masyarakat Kecamatan Tahuna Barat juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpartisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.

Tingginya partisipasi politik masyarakat tidak semata-mata menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi karena masih adanya masyarakat yang hanya sekedar asal ikut, seperti halnya ikut pilihan saudara, kerabat atau orang terdekat. Partisipasi politik masyarakat juga

masih ada yang bersifat dimobilisasi dengan adanya praktik money politik.

Saran

Pemilihan Kepala Daerah sebagai ajang untuk memilih pemimpin di masyarakat sebaiknya dimanfaatkan sebagai jalan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sebagai wujud demokrasi. Dengan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara diharapkan masyarakat akan selalu terpanggil untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Untuk Penyelenggara pemilihan kepala daerah baik dari KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Panwas kabupaten Kepulauan sangihe, Panwas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) agar lebih mensosialisasikan pentingnya pendidikan pemilih secara periodik.

Untuk partai politik agar lebih aktif mengadakan pendidikan politik secara langsung dengan masyarakat sehingga dapat mendengar aspirasi mereka, dan juga visi, misi, dan program dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, A. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- A, Rahman, H. I. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baswori. Sudukin. Susilo, S. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. 2007. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chosilin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dalton. 2009. *Comparative Politics Today: A World View, 9th edn*. New York: Person Logman.
- Gaffar, J. M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamid, Z. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maran, R, R. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marbur, B. N. 2002. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oeed. Mochtar dan Mac Andrew. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prihatmoko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Purwoko, B. 2005. *Isu-Isu Strategis Pilkada Langsung: Ekspresi Kedaulatan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Laboratorium Politik Unsoed: Jurnal Swara Politika.
- Rohaniah, Y. dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Instrans Publishing.
- Sudarmayanti. 2004. *Good Governace Bagian Kedua*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sitepu, A. P. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. DIKTAT.
- Sujarweni, W. V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PB Pustaka Baru Press.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryadi, B. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.